



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020
TELEPON (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAKSIMILE (021) 3810361

Nomor : 221/BUA/HM.01.2/08/2013
Sifat : Sangat Penting
Hal : Pidato Ketua Mahkamah Agung RI

2 Agustus 2013

Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan

di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-68 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013 di instruksikan kepada seluruh Pengadilan di empat lingkungan peradilan untuk melaksanakan upacara bendera yang dipusatkan untuk tahun 2013 di Pengadilan Tinggi setempat apabila memungkinkan dengan Inspektur Upacara Ketua Pengadilan Tinggi dengan membacakan pidato tertulis Ketua Mahkamah Agung RI oleh Inspektur upacara (terlampir pidato tertulis Ketua Mahkamah Agung RI) dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pengibaran bendera merah putih.
2. Penyampaian pidato tertulis Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Doa.

Khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan di Jakarta pelaksanaan upacaranya bergabung di Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Selaku
PLH. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,



Dr. Drs. ACO NUR, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA
HARI JADI MAHKAMAH AGUNG KE 68**

19 Agustus 2013

Dengan Tema :

“DENGAN KEBERSAMAAN DAN KETERBUKAAN MENUJU PERADILAN MODERN”

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Yang terhormat :

- Segenap Warga Peradilan yang saya cintai dan banggakan
- Pengurus dan Anggota Darma Yukti Karini

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pagi ini, yang atas karuniaNya, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa, untuk memperingati salah satu hari paling penting dalam sejarah eksistensi lembaga peradilan Indonesia, yaitu hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 68.

Hari jadi Mahkamah Agung ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/043/SSK/VIII/1999 tentang Penetapan hari Jadi Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 1945, atau dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terhitung tanggal pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RI Pertama Mr Dr RSE Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung oleh Presiden Pertama RI Ir Soekarno. Sehingga, meskipun badan peradilan telah berumur jauh sejak masa kolonial, namun secara resmi hari jadi Mahkamah Agung adalah tanggal 19 Agustus tersebut.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,
Sejak sepuluh tahun terakhir, Mahkamah Agung telah berusaha keras untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik melalui perbaikan terhadap semua lini lembaga peradilan. Keberadaan cetak biru untuk pembaruan peradilan, sebagai wujud dari kesatuan perencanaan dan komitmen langkah pembaruan ke depan merupakan wujud keseriusan pimpinan Mahkamah Agung untuk memastikan arah ke depan pengembangan lembaga peradilan. Tidaklah berlebihan apabila hari ini saya minta agar kita semua luangkan waktu sejenak untuk mengheningkan cipta, dan merenung, sejauh mana kiprah institusi tempat kita bernaung selama ini dari sisi perannya dalam konsep negara demokrasi, sejauh mana peradilan telah mampu memberikan solusi kepada masalah-masalah yang betul-betul dibutuhkan publik, lebih jauh, sejauh mana publik melihat dan menempatkan pengadilan di hati mereka, untuk kemudian merefleksikan, sejauh mana kontribusi kita semua sebagai insan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang kita idam-idamkan.

Perjalanan institusi ini telah sedemikian jauhnya, namun saya ingatkan, pekerjaan ke depannya masih akan lebih jauh dan lebih berat lagi. Selama ini Mahkamah Agung telah memulai dengan mengambil banyak langkah strategis untuk menjadikan lembaga peradilan secara keseluruhan, lembaga yang lebih mandiri, namun tetap transparan, akuntabel dan berwibawa di mata publik, dengan dikelola secara profesional. Beberapa kebijakan kunci yang telah diambil antara lain, implementasi keterbukaan informasi, perbaikan sistem manajemen perkara dengan memperkenalkan implementasi Sistem Informasi/Teknologi Informasi, perbaikan sistem keuangan, pendidikan dan latihan, sampai upaya berkelanjutan dalam menciptakan akses yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai cetak biru, pimpinan menginginkan, bahwa suatu saat nanti, dapat diwujudkan badan peradilan yang agung, yang antara lain mengambil wujud sebagai peradilan modern.

Modern dalam hal ini tidak hanya dalam arti harafiah-perangkat, namun juga cara berpikir. Hal ini penting, karena ke depan, tidak hanya peradilan dituntut untuk beroperasi lebih efektif dan efisien, baik secara teknis yudisial-maupun manajemen, namun juga harus mampu berpikir antisipatif, melewati batas-batas konvensional, dan memikirkan juga aspek Regional dan internasional yang mungkin akan mempengaruhi dinamika sistem peradilan kita, kesemuanya saya pikir sudah ada di depan mata kita semua dan menunggu untuk terjadi. Untuk itu, kemampuan untuk mengantisipasi dan melakukan adaptasi perlu dipertimbangkan secara serius oleh jajaran aparatur peradilan kita.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan, Tahun 2013 ditandai dengan capaian-capaian yang membanggakan, Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan keuangan Mahkamah Agung, setelah dua tahun berturut-turut memberikan peringkat Wajar dengan Pengecualian dan Disclaimer pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu tahun 2013 ini juga ditandai dengan ikhtiar-ikhtiar strategis untuk mewujudkan peradilan yang agung melalui upaya modernisasi proses kerja. Sistem pelacakan perkara (Case tracking System) yang dipergunakan untuk Peradilan Umum sudah kita luncurkan akhir tahun 2012 lalu di Denpasar, dan telah saya gariskan, bahwa sebelum tahun 2013 berakhir, maka CTS haruslah sudah beroperasi di seluruh pengadilan tingkat pertama. Saat ini saya pantau masih 23 Pengadilan Negeri yang belum terhubung datanya ke sistem pangkalan data CTS induk yang ada di Gedung Mahkamah Agung. Sistem pelacakan perkara yang sejenis juga sudah diberlakukan di Peradilan Agama diseluruh Indonesia, atau yang kita kenal dengan SIADPA, sedangkan sistem pelacakan perkara untuk peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Miltun) sedang diproses dan diharapkan dalam waktu yang tidak lama juga dapat diaplikasikan.

Ini semua tentunya perkembangan yang menjanjikan, dan benang merah diantara ini semua adalah, capaian-capaian tersebut bukanlah tujuan, namun masih sekedar proses untuk mencapai tujuan. Masih diperlukan kerja lebih keras untuk memastikan, bahwa tahun selanjutnya, capaian yang telah dicapai mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam hal Laporan Keuangan, sangat kritikal untuk memastikan bahwa ke depannya, Mahkamah Agung tetap mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal inisiatif terkait Teknologi Informasi, dalam hal ini CTS, harus

dapat dipastikan bahwa dari 100% pengadilan yang telah berpartisipasi, maka tingkat kepatuhan (compliance) harus juga mencapai 100%.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan, Adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan agenda kebijakan dan pembaruan yang digariskan pimpinan Mahkamah Agung bisa terlaksana dengan baik. Kinerja organisasi yang baik akan tergantung pada seberapa baik kebijakan manajerial pusat bisa disampaikan dan dipatuhi. Saya ingin agar segenap aparat peradilan semua memahami betul, pesan-pesan yang tercantum dalam cetak biru 2010-2035 dan agenda prioritas pembaruan tahunannya- rajin-rajinlah untuk memeriksa informasi di website Mahkamah Agung, dan satuan kerja-yang ada, jangan sampai ketinggalan informasi hanya karena kesulitan mengakses website karena alasan masih gaptek, atau terhambat akses karena buruknya infrastruktur, apabila ada hal yang tidak jelas, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi satker-satker eselon satu terkait, karena ini penting untuk memastikan supaya pembaruan bersifat inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali pentingnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung dan institusi peradilan pada umumnya. Sudah menjadi hukum alam, bahwa kepercayaan adalah hal yang harus diperoleh dari proses panjang, namun dapat hilang dalam sekejap, dan perlu saya sampaikan, pengadilan adalah institusi yang bekerja atas basis kepercayaan. Meskipun banyak sudah parameter statistik, dan kinerja dapat dikembangkan untuk mengkuantifisir kinerja yang dilakukan badan peradilan, namun pada akhirnya, yang paling penting adalah, bagaimana publik melihat institusi ini menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Saya minta agar segenap aparat peradilan mampu menjaga perilakunya, karena perilaku adalah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam institusi itu sendiri, Tidaklah berguna, semua kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, apabila dari waktu ke waktu masih ada saja aparat peradilan yang tidak hanya gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku, namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperdagangkan keadilan, saya akan pastikan, tidak ada toleransi bagi orang-orang seperti itu,

Ini menjadi tanggung jawab kita semua, negara sudah menunjukkan komitmen memperbaiki situasi kerja, fasilitas, termasuk keuangan hakim, sudah selayaknya praktek-praktek negatif masa lalu dienyahkan dari muka peradilan. Alangkah dzalimnya apabila komitmen dan kepercayaan negara kepada kita masih dilancarkan oleh segelintir oknum dan harus ditanggung oleh seluruh warga peradilan. Dalam kebersamaan dan keterbukaan, marilah kita wujudkan peradilan modern dalam arti yang seluas-luasnya.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan, Mengakhiri amanat ini, saya berharap dan berpesan, pada Saudara-saudara untuk terus berbakti dan mengabdikan yang terbaik pada bangsa dan negara. Tingkatkanlah kualitas moral, mental, perilaku, serta pengetahuan dan ketrampilan Saudara sebagai aparat peradilan yang profesional dan berintegritas. Sebagai institusi negara, junjung tinggi kode etika dan perilaku. Saudara-saudara semua adalah harapan masyarakat, bangsa dan negara dan dengan tekad yang kuat kita akan bisa bersama mencapai apa yang kita cita-citakan.

Terima kasih dan selamat berulang tahun segenap warga Mahkamah Agung RI,
Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, 19 Agustus 2013



Hatta Ali

Dr H M. Hatta Ali, SH., MH

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia